

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Pertumbuhan ekonomi merupakan proses kenaikan produksi perekonomian yang diwujudkan dalam bentuk kenaikan pendapatan nasional. Suatu negara dikatakan mengalami pertumbuhan ekonomi apabila terjadi peningkatan GNP riil di negara tersebut (Murni, 2006). Secara umum, pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator penting dalam melakukan analisis tentang pembangunan ekonomi yang terjadi pada suatu negara atau daerah. Menurut Mankiw (2003), pertumbuhan ekonomi menunjukkan sejauh mana aktivitas perekonomian akan menghasilkan tambahan pendapatan masyarakat pada suatu periode tertentu yang nantinya dapat menimbulkan perbaikan dalam kesejahteraan ekonomi masyarakat. Sebagaimana pesan dalam surat Al-Maidah ayat 3 :

دِينًا الْإِسْلَامَ لَكُمْ وَرَضِيَتْ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ وَأَتَمَمْتُ دِينَكُمْ لَكُمْ أَكْمَلْتُ الْيَوْمَ

“Pada hari ini telah Kusempurnakan untuk kamu agamamu dan telah Kucukupkan kepadamu nikmat-Ku, dan telah Kuridhai islam itu jadi agamamu” (Q.S Al-Maidah (5) :3).

Pertumbuhan ekonomi suatu negara dapat dilihat dari produksi barang dan jasa yang mampu dihasilkan oleh perekonomian di negara tersebut. Pertumbuhan ekonomi dikatakan sebagai pergerakan keatas dari seluruh sistem sosial. Sehingga pertumbuhan ekonomi bukan hanya menjadi perhatian dan agenda pemerintah pusat atau secara nasional melainkan juga menjadi

perhatian dan agenda setiap daerah disuatu negara. Hal ini disebabkan pertumbuhan ekonomi suatu negara dipengaruhi oleh pertumbuhan ekonomi di masing-masing daerah. Pertumbuhan ekonomi daerah juga merupakan perhatian penting tidak hanya pemerintah daerah saja tetapi juga pemerintah pusat (Kuncoro, 2010). Untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi disuatu daerah maka dapat dilihat dari Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) suatu daerah tersebut. Adapun perkembangan PDRB menurut lapangan usaha atas dasar harga berlaku dapat dilihat pada tabel 1.1

Tabel 1. 1
PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten/Kota di Provinsi D.I
Yogyakarta 2012-2017 (Jutaan Rupiah)

Tahun	Bantul	Sleman	Kulon Progo	Gunung Kidul	Yogyakarta
2012	14.510.832	25.732.248	5.916.574	10.545.354	20.536.855
2013	16.138.755	28.295.362	6.489.593	11.530.340	22.537.791
2014	17.682.924	30.912.238	7.056.571	12.557.371	24.664.285
2015	19.325.203	33.826.505	7.671.547	13.798.656	26.791.936
2016	20.913.085	36.932.843	8.312.004	14.980.280	28.895.413
2017	22.611.706	40.047.863	9.060.465	16.199.841	31.309.045

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2017

Dapat dilihat pada tabel 1.1 bahwa dalam beberapa tahun terakhir nilai PDRB di Provinsi D.I Yogyakarta selalu mengalami peningkatan yang cukup stabil. Hal ini menunjukkan bahwa Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi D.I Yogyakarta dalam beberapa tahun terakhir ini cukup stabil. Namun, terjadi perbedaan tingkat nilai PDRB di setiap Kabupaten dan Kota di Provinsi D.I Yogyakarta. Di tahun 2017 nilai PDRB tertinggi yaitu pada kabupaten Sleman sebesar 31.155.675., lalu disusul oleh Kota Yogyakarta yaitu sebesar 24.771.529 dan Kabupaten Bantul sebesar 17.211.819. Sedangkan pada tahun 2017 nilai PDRB terendah yaitu pada kabupaten Kulon Progo yaitu sebesar

6.973.625. Perbedaan tersebut dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di Provinsi D.I Yogyakarta. Oleh karena itu, PDRB di setiap kabupaten dan kota di Provinsi D.I Yogyakarta ini diperlukan analisis pengaruh faktor-faktor yang dapat meningkatkan nilai PDRB.

Jumlah penduduk memiliki peran sebagai pelaku produksi yang berhubungan dengan peningkatan pertumbuhan ekonomi. Menurut Todaro dan Smith (2006), pertumbuhan penduduk dan pertumbuhan angkatan kerja secara tradisional dianggap sebagai salah satu faktor positif yang dapat memacu pertumbuhan ekonomi melalui proses produksi. Jumlah tenaga kerja yang lebih besar akan menambah tingkat produksi, sedangkan pertumbuhan penduduk yang lebih besar akan menambah ukuran domestiknya yang lebih besar. Selanjutnya dikatakan bahwa pengaruh positif atau negatif dari pertumbuhan penduduk tergantung pada kemampuan sistem perekonomian daerah tersebut dalam menyerap dan secara produktif memanfaatkan penambahan tenaga kerja tersebut.

Tabel 1. 2
Jumlah Penduduk Kabupaten dan Kota di Provinsi D.I
Yogyakarta tahun 2013-2017

Tahun	Bantul	Sleman	Kulon Progo	Gunung Kidul	Yogyakarta
2013	955.015	1.147.037	401.450	693.524	397.828
2014	968.632	1.163.970	405.222	698.825	400.467
2015	971.511	1.167.481	412.198	715.282	412.704
2016	983.527	1.180.479	416.683	722.479	417.744
2017	995.264	1.193.512	421.295	729.364	422.732

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2017

Dapat dilihat pada tabel 1.2 bahwa jumlah penduduk Kabupaten dan Kota di Provinsi D.I Yogyakarta dalam beberapa tahun terakhir ini selalu mengalami peningkatan yang stabil. Pada tahun 2017 Jumlah Penduduk tertinggi yaitu pada Kabupaten Sleman berjumlah 1.193.512 jiwa. Kemudian disusul oleh Kabupaten Bantul berjumlah 995.264 jiwa dan Kabupaten Gunung Kidul berjumlah 729.364 jiwa.

Selain jumlah penduduk, faktor pengeluaran belanja modal juga memiliki pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Semakin besar pengeluaran pemerintah daerah yang produktif, maka semakin besar tingkat perekonomian suatu daerah (Wibisono, 2003). Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja Modal termasuk belanja tanah, belanja peralatan dan mesin, belanja modal gedung dan bangunan, belanja modal jalan, irigasi, dan jaringan dan belanja aset tetap dan aset lainnya (Halim, 2007).

Belanja modal dimaksudkan untuk mendapatkan aset tetap pemerintah daerah, yakni peralatan, bangunan, infrastruktur, dan harta tetap lainnya. Dengan peningkatan belanja modal, diharapkan dapat mendorong peningkatan ekonomi masyarakat yang pada gilirannya dapat memacu pertumbuhan pendapatan perkapita. Selain itu juga meningkatnya belanja modal diharapkan menjadi faktor pendorong timbulnya berbagai investasi baru di daerah dalam mengoptimalkan pemanfaatan berbagai sumber daya sehingga akhirnya dapat

meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah (Todaro, 2006). Berikut tabel pengeluaran belanja modal di provinsi D.I Yogyakarta dalam 5 tahun terakhir:

Tabel 1. 3
Pengeluaran Belanja Modal Pemerintah Kabupaten dan Kota di Provinsi D.I Yogyakarta Tahun 2013 – 2017 (Jutaan Rupiah)

Tahun	Bantul	Sleman	Kulon Progo	Gunung Kidul	Yogyakarta
2013	183.269	201.672	123.313	156.373	167.079
2014	310.415	282.862	146.753	127.289	193.078
2015	334.880	426.782	226.055	238.175	256.395
2016	284.060	344.002	241.983	234.690	259.589
2017	332.619	380.627	258.766	396.845	294.314

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2017

Dapat dilihat pada tabel 1.3 berdasarkan data Badan Pusat Statistik (2013-2017) pengeluaran belanja modal dalam lima tahun terakhir mengalami tren fluktuatif. Belanja modal yang tertinggi yaitu di kabupaten Sleman pada tahun 2015 sebesar 426.782 juta rupiah dan yang terendah yaitu di kabupaten Gunung Kidul pada tahun 2014 sebesar 127.289 juta rupiah. Belanja Modal dimaksudkan untuk mendapatkan aset tetap pemerintah daerah, yakni peralatan, bangunan, infrastruktur, dan harta tetap lainnya. Dengan peningkatan belanja modal dan memanfaatkannya secara produktif akan menjadi faktor pendorong meningkatnya pertumbuhan ekonomi di daerah (Todaro, 2006).

Faktor lain yang dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi suatu daerah adalah pendapatan asli daerah. Pendapatan asli daerah merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah (Halim, 2007). Adapun kelompok pendapatan asli daerah yang digolongkan menjadi empat jenis penerimaan, yaitu pajak daerah, retribusi daerah, hasil

kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah (Munir dkk., 2004). Menurut Saragih (2003), kenaikan atau peningkatan pendapatan asli daerah merupakan akses dari pertumbuhan ekonomi. Daerah yang pertumbuhan ekonominya positif mempunyai kemungkinan mendapatkan kenaikan pendapatan asli daerah.

Tabel 1. 4
Pendapatan Asli Daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi D.I
Yogyakarta Tahun 2013-2017 (Jutaan Rupiah)

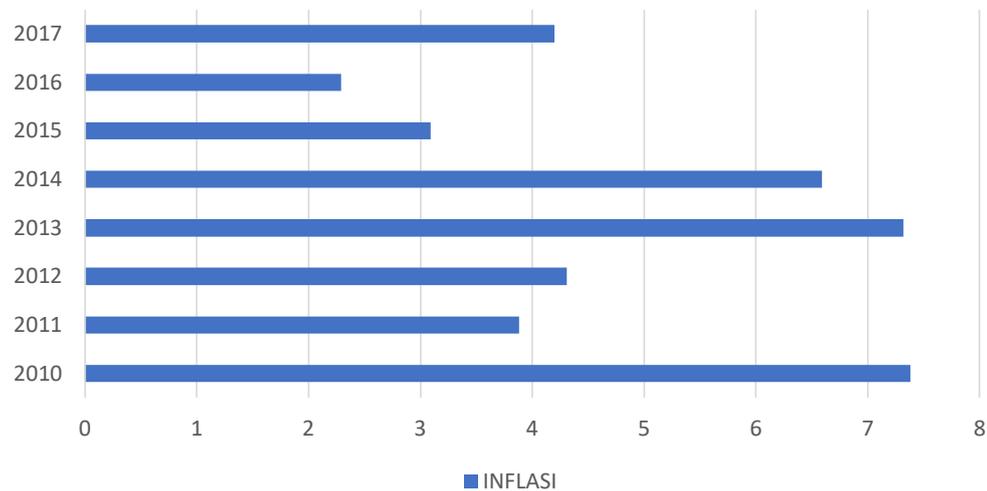
Tahun	Bantul	Sleman	Kulon Progo	Gunung Kidul	Yogyakarta
2013	224.197	455.998	95.991	83.427	383.052
2014	357.411	573.337	158.800	159.304	470.634
2015	390.624	643.130	170.822	196.099	510.548
2016	404.454	717.151	180.273	206.278	540.504
2017	494.179	825.637	249.692	271.370	657.049

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2017

Dapat dilihat pada tabel 1.4 bahwa realisasi pendapatan asli daerah kabupaten dan kota di Provinsi D.I Yogyakarta ini selalu mengalami peningkatan yang cukup stabil setiap tahunnya. Pada tahun 2017, pendapatan asli daerah yang tertinggi yaitu di kabupaten Sleman sebesar 825.637 dan yang terendah yaitu kabupaten Kulon Progo sebesar 249.692. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah telah mengoptimalkan potensi daerah dan kekayaan alam yang dapat digunakan sebagai akses dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

Salah satu indikator ekonomi makro yang digunakan dalam mengukur stabilitas perekonomian adalah inflasi. Pengertian inflasi secara umum merupakan suatu proses kenaikan harga-harga secara terus menerus yang berlaku dalam suatu perekonomian. Sedangkan tingkat inflasi adalah presentasi kenaikan harga-harga barang dalam periode waktu tertentu

(Sukirno, 2012). Adapun perkembangan tingkat inflasi di kota Yogyakarta dapat dilihat pada gambar 1.1



Sumber: Badan Pusat Statistik, 2017

Gambar 1.1
Perkembangan Tingkat Inflasi tahun 2010-2017

Pada gambar 1.1 menjelaskan bahwa inflasi mengalami peningkatan dan penurunan tiap tahunnya (fluktuatif). Pada delapan tahun terakhir, inflasi terlihat tinggi di tahun 2010 sebesar 7,38% dan yang terendah pada tahun 2016 sebesar 2,29%. Dampak inflasi bagi masyarakat yang berpendapatan tetap akan merugi karena menurunkan pendapatan riil. Tetapi pada prinsipnya tidak semua inflasi akan berdampak buruk pada ekonomi, terutama apabila terjadi inflasi rendah dibawah 10%. Inflasi yang rendah justru dapat mendorong terjadinya proses pertumbuhan ekonomi (Mankiw, 2003).

Berdasarkan teori yang ada, faktor jumlah penduduk memiliki peran yang sangat penting sebagai pelaku produksi karena dianggap sebagai salah satu faktor positif dalam memacu pertumbuhan ekonomi. Begitu pula dengan

belanja modal dan pendapatan asli daerah juga sangat diperlukan dalam penyediaan infrastruktur dan sarana prasarana yang ada di daerah dimana akan berdampak pada bertambahnya output suatu daerah. Dengan inflasi yang terkontrol, hal tersebut dapat menjadi bagian yang dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan di atas, peneliti tertarik untuk meneliti mengenai pengaruh jumlah penduduk, investasi, pengeluaran pemerintah, dan belanja modal terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi D.I Yogyakarta. Maka peneliti melakukan penelitian ini dengan judul **“ANALISIS FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PERTUMBUHAN EKONOMI KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2008 – 2017”**

B. Batasan Masalah

1. Mengkaji faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi kabupaten dan kota di Provinsi D.I Yogyakarta, yakni kabupaten Bantul, Sleman, Kulon Progo, Gunung Kidul, dan kota Yogyakarta.
2. Variabel dependen yang digunakan adalah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten dan Kota di Provinsi D.I Yogyakarta, sedangkan variabel independen yang digunakan yaitu Jumlah Penduduk, Belanja Modal, Pendapatan Asli Daerah, dan Inflasi.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaruh Jumlah Penduduk terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten dan Kota di Provinsi D.I Yogyakarta?

2. Bagaimana pengaruh Belanja Modal terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten dan Kota di Provinsi D.I Yogyakarta?
3. Bagaimana pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten dan Kota di Provinsi D.I Yogyakarta?
4. Bagaimana pengaruh Inflasi terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten dan Kota di Provinsi D.I Yogyakarta?

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh Jumlah Penduduk terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten dan Kota di Provinsi D.I Yogyakarta.
2. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh Belanja Modal terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten dan Kota di Provinsi D.I Yogyakarta.
3. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten dan Kota di Provinsi D.I Yogyakarta.
4. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh Inflasi terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten dan Kota di Provinsi D.I Yogyakarta.

E. Manfaat Penelitian

Hasil dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu menambah ilmu pengetahuan dan menjadikan penelitian ini sebagai acuan untuk penulisan karya ilmiah maupun penelitian selanjutnya dalam bidang perekonomian.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi penulis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan ilmu pengetahuan mengenai hal yang sudah diteliti, dan mampu membandingkan antara teori yang diterima diperkuliahan maupun dilapangan.

b. Bagi Pemerintah

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat untuk menjadi dasar kajian atau sebagai masukan bagi pemerintah dalam menganalisis faktor-faktor penting yang dapat mempengaruhi dan juga meningkatkan pertumbuhan ekonomi suatu daerah.